



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.592, 2012

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Gaji. Pensiun.  
Tunjangan Ketiga Belas. Petunjuk Teknis.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 89/PMK.05/2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN  
BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2012  
KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA,  
DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10  
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang  
Pemberian Gaji/ Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas  
dalam Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri,  
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan,  
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang  
Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/ Pensiun/Tunjangan  
Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 kepada  
Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima  
Pensiun/Tunjangan;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3890);**

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5319);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

9. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2012 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
2. Pejabat Negara adalah:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi;
  - e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
  - f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial);
  - g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak;
  - h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - j. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;

- k. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
  - l. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
  - m. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - n. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
3. Penerima Pensiun adalah:
- a. Pensiunan Pegawai Negeri;
  - b. Pensiunan Pejabat Negara;
  - c. Penerima Pensiun Janda/Duda/Anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
  - d. Penerima Pensiun Orang Tua dari PNS yang tewas.
4. Penerima Tunjangan adalah:
- a. Penerima Tunjangan Veteran;
  - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
  - c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
  - d. Penerima Tunjangan Janda/Duda dari penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM);
  - f. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI;
  - g. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
  - h. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
  - i. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan
  - j. Penerima Tunjangan Cacat.
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang

dipersamakan.

6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Operasional/ Kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SP2D berkenaan.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2012.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. Pegawai Negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
  - b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - c. Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara;
  - d. Pegawai Negeri penerima uang tunggu; dan
  - e. Calon Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

#### **Pasal 3**

- (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2012.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
  - a. Pegawai Negeri dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ tunjangan umum, dan tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja/tunjangan kinerja/insentif khusus;
  - b. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan
  - c. Penerima Tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dikenakan